

CITRA MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ANTI MISI KRISTEN INDONESIA

Siti Muflikhatul Hidayah

Mahasiswa Pasaca Sarjana Program Magister Pemikiran Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448

ABSTRACT

Muhammadiyah as a Dakwah movement, "Amar Makruf Nahi Mungkar", since its establishment has the motivation to block the development and movement of Christian missionaries in Indonesia, especially in Java. Incessant movement of Christianization made by the missionaries opened the eyes of KH. Ahmad Dahlan to immediately set up an organization and conduct missionary movement as a form of anti-Christian mission. Dakwah movement not only formulated by the lecture method, but also by building schools, build orphanages and health centers for the surrounding community. This is a concrete manifestation of the real Dakwah movement by Muhammadiyah.

Key Word: Muhammadiyah Movement, Anti-Christian Mission.

الجمعية المحمدية حركة الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وترجى هذه الحركة تستطيع أن تسد الدعوة النصرانية بإندونيسيا خاصة بجاوا.

ودفعت هذه الدعوة النصرانية أحمد دحلان أن يؤسس جمعية الدعوة لسدها. ولا تنحصر تلك الدعوة الإسلامية في الخطبة المنبرية فحسب بل نعم تلك الدعوة إلى بناء المدارس وبيوت الأيتام والمستشفيات، فسميت هذه الدعوة بالدعوة التنفيذية.

الألفاظ الرئيسية: المحمدية، الحركة، سد الدعوة النصرانية

Pendahuluan

Motif Pendirian organisasi Muhammadiyah, dilatarbelakangi oleh keprihatinan Ahmad Dahlan terhadap kondisi kaum Muslim, terutama di sekitar tempat tinggalnya yaitu di Yogyakarta. Keprihatinan pertama muncul setelah melihat banyak praktik pelaksanaan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan syari'at. Ajaran Islam yang dipraktikkan sebagian masyarakat banyak yang bercampur dengan kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan Islam.

Selain itu, keprihatinan Ahmad Dahlan yang paling penting tertuju pada kasus-kasus Kristenisasi yang semakin mengkhawatirkan. Keresahan muncul ketika penguasa keraton Yogyakarta, atas desakan pemerintah kolonial Belanda, menyetujui pencabutan larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa. Sejak saat itu, pulau Jawa menjadi terbuka bagi kegiatan misionaris Kristen.

Seiring dengan kebijakan Politik Etis yang ditetapkan pemerintah Belanda di bidang pendidikan, Kristenisasi pun tumbuh subur di bidang ini. Sekolah-sekolah misi Kristen ikut menjadi bagian dari program Politik Etis ini hingga di mana-mana tumbuh subur sekolah-sekolah Kristen yang dibiayai oleh pemerintah kolonial. Selain dalam bidang pendidikan, misi kristenisasi juga dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, kependuan, menyediakan rumah yatim, dan lainnya. Kegiatan sosial menjadi kegiatan andalan yang dilakukan oleh misionaris Kristen untuk menarik perhatian dan simpati umat Islam.

Usaha-usaha Muhammadiyah mendakwahkan Islam diwujudkan dengan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan yang kongkret nyata dengan membangun sekolah guru, mendirikan balai kesehatan, memelihara anak yatim, memberdayakan orang-orang miskin dengan memelihara, melatih bekerja, dan mencari mereka pekerjaan, mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda dalam kependuan Hizbul Wathan, mendirikan organisasi wanita, dan lain-lain. Usaha-usaha Muhammadiyah itu selain untuk meningkatkan kualitas ummat Islam juga untuk membendung arus Kristenisasi. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang bagaimana gerakan Muhammadiyah dalam membendung misi Kristen di Indonesia.

Faktor Pendirian Gerakan Muhammadiyah

Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 tak disangkal lagi, menurut Weinata Sairin¹, merupakan gerakan pembaharuan Islam yang ter-

¹ Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 18.

besar di Indonesia. Dengan bertolak dari kenyataan besarnya jumlah anggota gerakan ini yang tersebar tidak saja di Indonesia, namun juga tumbuh di beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain, serta luasnya bidang pelayanan yang digarap, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan yatim-piatu, dan lain-lain, maka James L. Peacock menyimpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam yang terkuat yang ada di kalangan Islam di Asia Tenggara, bahkan mungkin saja di seluruh dunia Islam.²

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia lahir atas dorongan kondisi-kondisi dan situasi yang mengitari dunia Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 yang mencakup antara lain kondisi sosial-politik, kultural, dan keagamaan. Dalam memperbincangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan pembaharuan Muhammadiyah, diperoleh banyak teori atau persepsi yang bermunculan, antara lain, seperti yang dikemukakan Alwi Shihab³ bahwa ada empat teori yang bisa dijelaskan sebagai latar belakang yang mendorong lahirnya Muhammadiyah.

Pertama, teori faktor gagasan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Menurut teori ini, selama paruh akhir abad ke-19, gagasan

pembaharuan Islam yang tengah berkembang di beberapa negara Timur Tengah mulai diperkenalkan di Indonesia baik secara langsung oleh para jamaah haji yang menyampaikan kepada mereka secara lisan maupun secara tidak langsung melalui berbagai penerbitan dan jurnal yang tersebar di kalangan kaum Muslim santri di Indonesia.

Pada pergantian abad, gagasan pembaharuan yang dikembangkan oleh Jamal al-Din al-Afghani (w. 1897), Syaikh Muhammad Abduh (w. 1905), dan penerusnya, Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935) mulai mendapat tempat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Menurut Shihab, akar-akar pembaharuan Islam di Indonesia secara historis dapat dilacak ke tahun-tahun pertama abad ke-19. Data sejarah yang ada menunjukkan bahwa gagasan pembaharuan Islam yang berasal dari luar wilayah geografis Indonesia telah memberi pengaruh besar di Indonesia.

Kedua, teori faktor pembaharuan Muhammad Abduh. Menurut teori ini, gerakan pembaharuan yang dipimpin Jamal al-Afgani dan Muhammad Abduh yang tumbuh di Timur Tengah pada akhir abad ke-19, merupakan kelanjutan logis gerakan awal pembaharuan Wahabiyah. Dari dua tokoh pembaharu tersebut, sebagian kalangan meyakini bahwa gagasan pembaharu-

² *Ibid*

³ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 127.

an Abduh lebih besar dan bertahan lama pengaruhnya terhadap lahir dan berkembangnya Muhammadiyah.

Shihab⁴ mencatat, kecenderungan Muhammadiyah menerima gagasan-gagasan dan metode modern, pandangannya tentang politik, dan wataknya yang tidak bersikap oposisional terhadap kemapanan menunjukkan keterpengaruhannya, setidaknya peniruanannya yang simpatik, oleh gagasan-gagasan Muhammad Abduh. Selain itu, hal yang menguatkan teori ini adalah bahwa baik gagasan pembaharuan Abduh maupun gerakan Muhammadiyah pada dasarnya bersifat keagamaan, karena keduanya berakar dalam al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya juga menggalakan gagasan dibukanya kembali pintu *ijtihad* dan mengecam *taqlid*. Ditambah lagi, keduanya sama-sama menjadikan pandangan-pandangan Ibn Taymiyyah sebagai sumber utama rujukan mereka.

Ketiga, teori faktor pertentangan internal dalam masyarakat Jawa. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kela hiran Muhammadiyah tidak lebih dari suatu akibat adanya proses pertentangan yang panjang dan berlangsung perlahan antara dua kelompok besar dalam masyarakat Jawa, yakni kaum priyayi di satu pihak dan kaum santri di pihak lain. Kaum priyayi adalah kelompok Muslim yang dangkal tingkat komitmen keislamannya, sedangkan

kaum santri merupakan kelompok Muslim yang sangat taat dan tinggi komitmen keislamannya. Hubungan antara kedua kelompok Muslim ini meliputi baik konfrontasi yang keras maupun kolaborasi yang saling menguntungkan. Tetapi, pola hubungan yang dominan adalah kesalahpahaman dan rasa saling tidak percaya di antara kedua belah pihak.

Dalam sejarahnya, Yogyakarta – di mana Ahmad Dahlan dilahirkan dan mendirikan Muhammadiyah – adalah pusat kerajaan Mataram Jawa. Sebagai keturunan kaum Muslim santri, Ahmad Dahlan – yang sebelumnya bernama Muhammad Darwis – lahir dan tumbuh di lingkungan yang relijius tempat ortodoksi Islam tengah menghadapi ancaman serius Jawa-Hindu. Saat berdiri Budi Utomo, Ahmad Dahlan menyaksikan kuatnya Islam sinkritis melalui kebangkitan kebudayaan priyayi. Kendatipun Ahmad Dahlan adalah anggota Budi Utomo di satu sisi dan sebagai elite Kraton Yogyakarta di sisi lain, namun ia merasa ditantang oleh berkembangnya kebudayaan Hindu-Islam, semangat keagamaan Ahmad Dahlan tergugah untuk bertindak segera melawan gelombang ini. Bentuk perlawanannya adalah dengan mendirikan sebuah organisasi atau gerakan dakwah yang membebaskan Islam Jawa dari campuran adat dan kepercayaan lokal, yang kemudian organisasi ini

⁴ *Ibid*, hlm. 132.

bernama Muhammadiyah yang resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912.

Dengan demikian, bagi pendukung teori ini, lahirnya Muhammadiyah merupakan respon logis terhadap “ketidakmurnian” yang telah lama berakar dalam masyarakat, yang ditumbuhkan oleh kebudayaan priyayi semenjak zaman Mataram. Untuk itulah mengapa Muhammadiyah lebih dikenal dan menonjol sebagai gerakan pemurnian daripada gerakan modernisasi. Muhammadiyah tampil untuk menyaring dan membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh tradisi kebudayaan Jawa kalangan priyayi dan abangan. Lahirnya Muhammadiyah, dalam konteks ini, merupakan ekspresi lain dari pertentangan terus-menerus dalam masyarakat Jawa.

Namun demikian, teori ini tidak sepenuhnya benar dan tanpa perkecualian. Salah satu perkecualian tersebut adalah sebuah fakta bahwa hubungan Muhammadiyah dengan kaum priyayi, khususnya yang tergabung dalam Boedi Oetomo, pernah mengalami kemesraan dan keerratan. Bahkan, kongres Boedi Oetomo pada tahun 1917 diselenggarakan di rumah Kyai Haji Ahmad Dahlan Kauman Yogyakarta, sang ketua Persyarikatan Muhammadiyah yang juga terdaftar sebagai anggota Boedi Oetomo. Peristiwa ini juga dicatat

oleh sejarah betapa partisipasi Muhammadiyah terhadap semangat kebangsaan melalui organisasi Boedi Oetomo tersebut⁵.

Dan *keempat*, teori faktor penetrasi Kristen. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor menentukan yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Dalam konteks ini, berdirinya Muhammadiyah adalah perkembangan logis dalam menghadapi kegiatan misi Kristen yang diberi dukungan dan kekuatan luar biasa oleh para penguasa kolonial Belanda. Muhammadiyah didirikan untuk menawarkan diri sebagai suatu cara mempertahankan diri dari pengaruh misi Kristen, yang saat itu kaum Muslim Indonesia telah merasakan adanya tantangan dari misi Kristen yang harus mereka hadapi dan lawan dengan segala cara jika ingin menjaga keutuhan agama mereka dan generasi Muslim mendatang.

Respon Muhammadiyah terhadap Kristenisasi

Kesadaran dan resistensi atas bahaya Kristenisasi ini sengaja ditumbuhkan oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Dalam suatu pernyataannya, Dahlan mengingatkan kaum Muslim bahwa apabila mereka tidak bertindak segera dan membiarkan

⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 21.

situasi dewasa ini terus berlangsung tanpa melakukan tindakan apapun, maka situasinya akan makin memburuk dan hal itu tidak akan bisa diperbaiki lagi nantinya. Ahmad Dahlan juga mengingatkan bahwa meskipun Islam tidak akan pernah lenyap dari muka bumi, kemungkinan Islam lenyap di Indonesia tetap terbuka⁶.

Selain itu, elaborasi Dahlan atas ayat-ayat dalam Surah al-Ma'un; yang menyerukan agar cinta dan kasih sayang tercerminkan dalam aksi-aksi konkret dan penekannya agar ajaran-ajaran al-Quran ini diterapkan dalam berbagai proyek pengembangan masyarakat, telah memperkuat keputusannya untuk secara tegas berkompetisi, bahkan terkadang konfrontasi, dengan kegiatan misi Kristen.

Masalah misi Kristen ini telah mencuri perhatian Ahmad Dahlan, selain juga memiliki perhatian yang sangat besar pada kenyataan konflik di antara kaum ulama sendiri dan masalah-masalah pelaksanaan ibadah di kalangan umat Islam pada era ini. Dengan menerapkan cara-cara modern seperti yang selama itu juga diterapkan oleh misi Kristen, Ahmad Dahlan menjadikan Muhammadiyah sebagai wadah perlawanan menghadapi penetrasi Kristen secara terbuka langsung.

Meskipun demikian, cara dan pendekatan yang ditempuh Ahmad Dahlan ini dilakukan secara simpatik dan sistematis. Dahlan memandang untuk menyaingi misi Kristen, Muhammadiyah perlu mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, klinik, dan lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia. Strategi Ahmad Dahlan ini tak pelak belakangan memunculkan tuduhan dari banyak kalangan bahwa Muhammadiyah adalah "Kristen Alus" atau "Kristen Putih", sebagaimana dikemukakan Ahmad Syafii Maarif terdahulu.

Menurut Shihab⁷ ada tiga variabel lain yang dipertimbangkan Ahmad Dahlan untuk menggerakkan Muhammadiyah dalam merespon misi Kristen ini, yaitu: *pertama*, "Ordonansi Guru" oleh pemerintah kolonial Belanda; melalui Ordonansi ini pemerintah Belanda berharap dapat melakukan pengawasan terhadap aneka kegiatan guru dan murid di sekolah agama-agama, dengan membatasi gerakan guru-guru agama dan umumnya untuk menghambat kemajuan Islam.

Kedua, pelanggaran pemerintah Belanda terhadap kebudayaan lokal; pada tahun 1919 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan dekret yang mengakibatkan hukum

⁶ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 143.

⁷ *Ibid.* hlm. 146

adat –yang ternafaskan nilai- nilai ajaran Islam – secara perlahan-lahan dengan hukum negara, yang nota-benanya adalah bentuk hegemoni hukum Hinda-Belanda. Akibatnya, kaum Muslim khususnya merasa sakit hati, namun tidak ada yang bisa dilakukan mereka terkecuali memobilisasi usaha-usaha untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim kolonial yang ingin mendukung dan memajukan aturan-aturan hukum yang diilhami oleh agama Kristen.

Dan, *ketiga*, pembentukan *freemasonry*; tujuan utama lembaga ini adalah membantu para anggota dan masyarakat luas. Lembaga ini berusaha menghimpun dana dalam bentuk sumbangan yang terorganisasi untuk mendirikan berbagai sarana pendidikan dan sosial. Hal yang dicermati oleh masyarakat Muslim pada saat itu adalah bahwa lembaga *Freemasonry* Indonesia digerakkan oleh orang-orang Kristen yang sadar diri dan sangat peduli kepada penyebaran Injil. Akibatnya, kaum Muslim mulai merasakan munculnya bahwa yang dihadapi Islam adalah sebuah situasi yang memberi peluang pada terjadinya upaya Kristenisasi di Indonesia. Menjawab situasi ini, lahir lah gagasan mendirikan Muhammadiyah. Dengan demikian, pendirian Muhammadiyah juga tidak terlepas dari reaksi terhadap keberadaan dan perkembangan pesat *Freemasonry*.

Teori lain tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah, dikemukakan Ahmad Syafii Maarif (1986: 66), yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005. Dengan mengutip pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), Syafii Maarif menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyah, yakni: (1) keterbelakangan serta kebodohan umat Islam Indonesia di hampir semua aspek kehidupan, (2) kemiskinan yang sangat parah yang diderita umat Islam justru dalam suatu negeri yang kaya seperti Indonesia, dan (3) keadaan pendidikan Islam yang sudah sangat kuno, sebagaimana yang bisa dilihat melalui pesantren.

Sementara teori lain, dengan mengacu kepada berbagai pandangan yang ada, Weinata Sairin⁸ dalam penelitiannya menyimpulkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan lahirnya gerakan pembaharuan Muhammadiyah, yaitu: (1) kondisi Islam di Jawa; (2) pengaruh gerakan modernis Islam di Timur Tengah; dan (3) politik Islam pemerintah Belanda.

Dari berbagai teori perihal faktor-faktor yang melatari kemunculan gerakan Muhammadiyah ini sesungguhnya ada benang merah yang bisa kita cermati dan pahami, yakni bahwa Muhammadiyah

⁸ Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 25.

sepanjang sejarahnya telah membuktikan dirinya menjadi salah satu gerakan yang selalu berada di garda depan dalam memperjuangkan cita-cita sosialnya, yakni, terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah *Subhanahu wata'ala*, yang kemudian pada perkembangan terkini, pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, terjadi perubahan dalam Bab II pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan menjadi: "Maksud dan Tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya".⁹

Sejak awal pertumbuhannya, menurut Syamsul Arifin¹⁰ Muhammadiyah senantiasa dihadapkan dengan realitas sosial keagamaan yang kompleks. Setidaknya ada dua persoalan sosial keagamaan yang signifikan mempengaruhi Muhammadiyah dalam merumuskan visi dan menentukan dinamikanya pada masa-masa berikutnya. *Pertama*, persoalan autentisitas dalam paham dan praktek keberagaman masyarakat Islam. Muhammadiyah melihat banyak paham dan praktik keagamaan umat Islam yang bercampur-baur dengan tradisi yang berkembang sebelum kedatangan Islam di bumi Nusantara, seperti animisme, dinamisme, kejawen, Hinduisme,

dan Budhisme. Dalam merespon realitas praktik keagamaan umat Islam seperti ini Muhammadiyah melakukan gerakan purifikasi, yakni memurnikan kembali paham dan praktik keberagaman kepada sumber autentiknya yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Persoalan *kedua* adalah penetrasi kalangan misionaris Kristen yang mendapatkan sokongan dan dukungan politik dari penguasa kolonial Belanda. Dalam merespon arus Kristenisasi yang dilakukan kaum misionaris ini, Muhammadiyah cenderung melakukan tindakan kompetitif bahkan adaptatif, daripada tindakan konfrontatif, terutama pada zaman KH. Ahmad Dahlan.

Berbeda dengan kalangan muslim tradisional seperti NU yang lebih menekankan fungsi konservatif terhadap intitusi pendidikannya, maka Muhammadiyah justru mengadaptasi metode kaum misionaris Kristen dengan melakukan modernisasi pendidikan, baik dalam kelembagaan maupun metode pembelajarannya. Modernisasi ini juga dilakukan Muhammadiyah dalam berbagai bidang lainnya, seperti bidang kesehatan dan keorganisasian.

Kearifan tidak saja dibutuhkan ketika menghadapi perbedaan dalam lingkungan sosial-keagamaan

⁹ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44*, Yogyakarta: PPM, 2000, hlm. 61.

¹⁰ Edy Suandi Hamid, M. Dasron Hamid, dan Syafri Sairin (penyunting), *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era ultiperadaban*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 74.

yang relatif homogen, seperti antara Muhammadiyah dan NU, yang menurut Syamsul Arifin¹¹ keduanya sesungguhnya bisa disinergikan karena memang tidak ada perbedaan teologis yang fundamental. Sikap ini juga dibutuhkan dalam konteks lingkungan sosial-keagamaan yang heterogen, karena konflik sosial lebih mudah terjadi, seperti antara Islam dan Kristen. Dengan pertimbangan seperti inilah maka, Syamsul Arifin menyarankan, Muhammadiyah untuk melakukan transformasi dari pendekatan kompetitif ke pendekatan kooperatif dan lebih proaktif dalam mengembangkan wacana pluralitas dan pluralisme agama ini.

Terlepas dari saran Arifin di atas, maka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan dan perubahan ruang dan waktu ini Muhammadiyah, sebagaimana yang diyakini salah seorang pengurus PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, akan mampu menghadapinya. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah memiliki sejumlah prinsip fundamental yang bersifat ideologis. Pemikiran ideologis Muhammadiyah diyakini akan digunakan untuk membangun kekuatan umat atau warga menjadi pilar masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pemikiran ideologis juga diyakini dapat menjadi salah satu alternatif utama ketika harus berhadapan dengan sistem ideologi lain yang berseberangan dengan misi dan

kepentingan Islam maupun Muhammadiyah.

Citra Anti Misi Kristen dan Reaksi Muhammadiyah terhadap Krisenisasi di Indonesia

Salah satu dari peran penting Muhammadiyah dalam sejarah kehidupan keagamaan di Indonesia adalah sebagai pembendung paling aktif misi Kristenisasi di Indonesia. Peran inilah, bersama dengan upaya internal untuk gerakan pemurnian Islam dengan memberantas apa yang disebut oleh kalangan Muhammadiyah sebagai TBC (*Tahayul, Bid'ah, dan Churafat*), yang pada akhirnya berdampak pada menguatnya citra puritanisme bagi organisasi keagamaan yang hingga kini memiliki pengaruh dan peran penting di Indonesia ini, di samping Nahdlatul Ulama.

Citra puritanisme ini dan citra anti misi Kristen ini berlangsung setidaknya sejak periode pendiriannya hingga masa Orde Baru, kendati dalam beberapa hal tesis ini tidak sepenuhnya relevan. Pada diri KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri dan pimpinan periode awal Muhammadiyah, misalnya, yang dikenal sebagai tokoh yang bersikap toleran dan terbuka terhadap orang Kristen dan kegiatan misionaris mereka di bandingkan tokoh-tokoh teras Muhammadiyah sesudahnya sepanjang masa awal pendirian organisasi ini. Menurut banyak

¹¹ *Ibid*, hlm. 78-79

pengamat, kendati masalah kegiatan para misionaris Kristen sebagai salah satu yang menjadi kepedulian utamanya, selain masalah kehidupan agama yang tidak murni, masalah pendidikan agama yang tidak efisien, dan masalah sikap masa bodoh dan bahkan anti agama dari kalangan intelegensia, Ahmad Dahlan dapat bersikap toleran kepada kelompok Kristen, juga kelompok agama lainnya. Padahal, kecenderungan para pemuka Islam dan organisasi Islam lainnya lebih memilih cara konfrontatif kepada kelompok Kristen dan pemerintah kolonial Belanda¹².

Sikap toleransi terhadap kelompok Kristen dan kegiatan misionaris maupun kesediaannya untuk kerjasama yang kreatif dan harmonis dengan pemerintah Belanda pada saat awal-awal dibentuknya Muhammadiyah, menurut Shihab, tidak terlepas dari pendekatan yang realistik dari Ahmad Dahlan sendiri. Sebagai misal dampak positif dari sikap toleran dan cinta damai Ahmad Dahlan ini secara internal adalah kemudahan dalam pembentukan infrastruktur yang kukuh bagi kelanjutan organisasinya. Namun secara eksternal, hal ini berdampak Muhammadiyah dibenci oleh sebagian kalangan Muslim lainnya karena dianggap mendukung rezim kolonial atau

sekurang-kurangnya tidak menentangny¹³.

Sebagai organisasi yang paling aktif membendung misi-misi Kristenisasi, Muhammadiyah secara terbuka berupaya menanggulangi pasang naik kegiatan misionaris Kristen dalam berbagai cara. Dengan perannya sebagai gerakan pembendung misi Kristenisasi inilah mengakibatkan Muhammadiyah lebih dikenal sejarah sebagai sebuah gerakan Islam yang puritan dan kurang –untuk tidak mengatakan tidak –toleran dan terbuka terhadap keberadaan pemeluk agama lain, terutama umat Kristiani, daripada sebagai gerakan yang melakukan modernisasi Islam di Indonesia.

Dalam kaitan ini, Muhammadiyah dianggap sebagai kelompok atau organisasi Islam yang paling gencar dan serius dalam merespon fenomena dan isu “Kristenisasi” di Indonesia. Bahkan kehadiran misi Kristen dan penetrasi mereka pada masa kolonialisme di Republik ini dianggap sebagai pendorong utama yang memicu munculnya semangat keagamaan K.H. Ahmad Dahlan yang pada akhirnya berkehendak untuk mendirikan Muhammadiyah, kendati cara dan pendekatan yang dilakukan Ahmad Dahlan ini relatif lebih moderat dibanding elite Muhammadiyah yang melanjutkan kepemimpinannya.

¹² Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 111.

¹³ *Ibid.* hlm 119 dan 160.

Sebagai misal, pada masa kepemimpinan Fachruddin (1923-1929) dianggap oleh banyak kalangan sebagai tahap yang paling dramatis apabila dihubungkan dengan konteks sejarah interaksi Muhammadiyah dengan aktivitas Kristenisasi. Reaksi agresif dan konfrontatif, bahkan bermusuhan, dari Muhammadiyah kepada misi Kristen tidak terlepas sebagai pengaruh dari karakter Fachruddin yang memang dikenal agresif. Pada gilirannya Fachruddin membawa Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang semakin bersifat tegas (assertif) dan militan dalam kritik terbukanya terhadap misi Kristen.

Fakta reaktif dan konfrontatif lainnya adalah ketika pada 1925 seorang tokoh Muhammadiyah, yakni Haji Sujak, dengan sengit menyerang Residen Belanda dan Sultan Yogyakarta karena dianggap telah mengurangi setengah dari jumlah subsidi yang seharusnya diberikan untuk klinik dan rumah jompo yang dikelola Muhammadiyah. Sikap reaktif Haji Sujak ini dipicu akibat alokasi dari pengurangan subsidi tersebut justru diberikan untuk membiayai rumah-rumah jompo milik Sultan, yang sesungguhnya dikelola oleh rumah sakit Kristen¹⁴.

Akumulasi dari perseturuan Muhammadiyah dengan misi Kristen pada fase pertama dari perjumpaan dengan misi Kristen atau masa pemerintah Kolonial

Belanda ini mencapai titik klimaksnya dalam "Peristiwa Ten Berge" (*Ten Berge Affair*) karena Muhammadiyah bersama hampir seluruh pergerakan Indonesia lainnya terlibat dalam perjuangan menentang penguasa Belanda yang menyokong misi Kristen tersebut. Peristiwa ini terjadi dimulai pada 1931 ketika seorang pastor Jesuit, J.J. Ten Berge, menerbitkan dua artikel yang mengomentari ayat-ayat al-Quran tertentu dan secara terang-terangan menyerang rasa keagamaan kaum Muslim. Akibatnya, terjadi gelombang antipati dan kemarahan kaum Muslim terhadap kalangan Kristen secara meluas. Muhammadiyah, bersama Persatuan Islam (Persisi) dan gerakan modernis Islam lainnya, menyampaikan serangan balik terhadap artikel-artikel anti Islam dari Ten Berge itu dan menggalang pertemuan massa untuk melakukan protes yang diadakan di sejumlah kota di tanah air.

Pada masa rezim Soekarno, salah satu peristiwa yang bisa menggambarkan reaksi yang konfrontatif dari Muhammadiyah terhadap kalangan Kristen adalah seputar perdebatan dalam tuntutan dari kelompok Kristen yang meminta penghapusan "tujuh kata" dalam naskah "pembukaan" UUD 1945, yang kemudian dokumen ini dikenal sebagai "Piagam Jakarta". Kendati bukan sebagai satu-satunya kelompok Islam yang bersuara keras

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 162-163.

menolak tuntutan kelompok Kristen tersebut, Muhammadiyah, yang terrepresentasikan pada Ki Bagus Hadikusumo sebagai wakil sah dari unsur Muhammadiyah dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk 14 Agustus 1945, secara gigih mempertahankan “tujuh kata” dalam naskah tersebut. Bahkan, sebaliknya, Muhammadiyah mengusulkan agar naskah tersebut berisikan pernyataan, “Negara didirikan dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”.

Namun kegigihan Muhammadiyah ini tak terbayar karena, dengan berbagai pertimbangan termasuk demi terjaganya kesatuan dan persatuan negeri yang baru terlahir setelah sekian lama berada dalam cengkeraman penjajahan, akhirnya kelompok Islam harus berbesar hati untuk mengakomodir tuntutan Kristen dengan bersedia dilakukan penghapusan “tujuh kata” tersebut. Persoalan di seputar “tujuh kata” ini, menurut Shihab¹⁵, mengakibatkan kegetiran dan memburuknya hubungan antara kelompok Muslim dan kelompok Kristen Indonesia dan berkali-kali muncul kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada Era Soekarno ini misi Kristen memulai taraf permulaan berbagai aktivitasnya dalam penyebaran agama dan berbagai kegiatan pelayanan sosial.

Secara perlahan misi Kristen ini berkembang pesat sehingga semakin menguatkan pula reaksi perlawanan yang dilakukan kelompok Muslim, termasuk Muhammadiyah. Apa yang dirintis misi Kristen pada era Soekarno ini secara umum mulai menampakkan hasilnya pada masa kekuasaan Soeharto, yang dikenal sebagai “Orde Baru”, karena berhasil mengakhiri pengaruh komunisme di Indonesia pada “Orde Lama”-nya Soekarno.

Reaksi Muhammadiyah terhadap misi Kristen dan aktivitas Kristenisasi ini semakin sering dan intens, seiring dengan perkembangan kemajuan aktivitas kelompok Kristen tersebut pada era Soeharto. Kemajuan dan perkembangan pesat kelompok Kristen sendiri dipicu akibat gelombang konversi dari bekas pengikut PKI setelah kegagalan mereka dalam kudeta pada 1965, demi menyelamatkan diri dari aksi “pengganyangan” komunisme di Indonesia yang disuarakan dan dilakukan kelompok Islam. Beberapa contoh reaksi yang diberikan oleh kalangan Muhammadiyah terhadap aksi dan perilaku kelompok Kristen pada era rezim Soeharto ini, antara lain:

1. Menyusun publikasi bernada apologetis untuk merespon membuka pikiran umat Islam agar tetap menuju “kebenaran Islam”. Sebagai misal, Haji Djarnawi Hadikusumo, yang

¹⁵ *Ibid.* hlm. 172.

juga anggota dewan pengarah Muhammadiyah, menulis dua buah karya tulis diterbitkan pada 1965 oleh Muhammadiyah, yakni berjudul: *Sekitar Kristologi*, dan *Perdjanjian Lama dan Perdjanjian Baru*, untuk mengemukakan bahwa ajaran-ajaran pokok Kristen tidak otentik lagi.

Karya tulis lain, sebuah buku yang berjudul *Yesus dalam Al-Quran dan Muhammad dalam Bibel*, ditulis oleh Hasbullah Bakry, seorang cendekiawan Muhammadiyah, untuk menanggapi buku berjudul *Tuhan Yesus dalam Islam*, yang ditulis sebelumnya oleh misionaris Kristen, E.L. Bakker.

Demikian juga sebelumnya, pada 1964 Muhammadiyah juga menerbitkan dan mengedarkan pamflet yang bernada absolutisme dan diwarnai serangan sengit terhadap misionaris Kristen. Pamflet ini menekankan khususnya apa yang disebut dengan "Rencana Kristenisasi Rakyat Indonesia". Dengan pamflet ini, Muhammadiyah berharap akan kesadaran umat Islam pada umumnya untuk mewaspadai kegiatan misionaris Kristen Jawa.

2. Pada 10 Juli 1967 Lukman Harun, salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga anggota DPR, berinisiatif menggalang

hak interpelasi mengenai pertentangan Kristen dan Muslim, agar pemerintah segera menertibkan penggalangan dana dari luar negeri yang digunakan para misionaris dalam aktivitas misionarinya.

Demikian juga soal pengaturan kegiatan dakwah atau misionari pada masyarakat beragama, dan prosedur pembangunan tempat ibadah. Interpelasi yang diajukan Lukman Harun ini, dan didukung oleh 30 orang anggota dewan lainnya, bertujuan untuk membatasi kegiatan misi Kristen tersebut.

3. Pada 1973, Muhammadiyah memerankan diri secara aktif bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya dalam pengajuan tuntutan revisi Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah diajukan pemerintah. Revisi dituntut oleh mereka karena dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Tuntutan mereka akhirnya berhasil dengan disahkannya RUU itu menjadi UU perkawinan pada tahun 1974, dengan meninggalkan kekecewaan kalangan Kristen yang selama ini mendukung RUU Perkawinan versi asal.

4. Pada 1981, Buya Hamka, seorang ulama Muhammadiyah sekaligus ketua umum MUI

pertama, melalui lembaga MUI yang dipimpinnya memfatwakan diharamkannya umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal. Fatwa ini dilatari oleh keprihatinan terhadap opini yang berkembang pada sebagian umat Islam yang merasa perlu hadir memenuhi undangan dalam perayaan Natal dengan dalih toleransi agama. Menurut Hamka, umat Islam harus dilindungi dari keterlibatan di dalam pelbagai ritual agama lain, salah satunya dengan fatwa ini, sehingga mereka tidak takut lagi dituduh tidak toleran ketika menolak menghadiri perayaan Natal.

5. Pada 1989, ada dua persoalan yang melahirkan ketegangan serius antara kelompok Kristen dan Muslim, termasuk Muhammadiyah, yakni: *pertama*, perdebatan menyangkut pemberlakuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan, *kedua*, kontroversi di seputar rancangan undang-undang berkenaan dengan Undang-undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelompok Kristen, juga sebagian kalangan sekular, menganggap kedua rancangan undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila, karena dipandang mengandung semangat “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta yang dulu

mereka berhasil menolaknya.

Secara khusus berkenaan rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, kelompok Kristen berkeberatan dengan pasal 28 ayat 2, beserta penjelasannya, bahwa: “Untuk memenuhi persyaratan sebagai guru, sang pendidik harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Besar, menguasai wawasan Pancasila dan UUD 1945, dan memiliki ketrampilan mengajar yang diperlukan; afiliasi keagamaan guru yang mengajar agama harus sama dengan agama yang dianut murid-muridnya”. Kalangan Kristen keberatan dengan alasan pasal 28 ayat 2 ini akan menghilangkan watak unik setiap sekolah swasta, khususnya sekolah-sekolah yang dimiliki yayasan Kristen, dan ditambah lagi, akan berakibat keharusan menyediakan guru-guru Muslim untuk mengajarkan Islam kepada siswa-siswa Muslim mereka; sesuatu yang tidak mungkin dilakukan mereka.

Peran Muhammadiyah dalam perdebatan ini secara jelas terlihat dalam pernyataan resminya, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Ismail Sunny, bahwa Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa pertimbangan mengenai ran-

cangan undang-undang Peradilan Agama berdasarkan sila-sila Pancasila. Muhammadiyah menolak argumen keberatan kelompok Kristen bahwa negara tidak berhak mengatur pemenuhan kewajiban agama kaum Muslim. Argumen kelompok Kristen, bagi Muhammadiyah, adalah “tidak berdasar dan inkonstitusional”. Apa yang diperjuangkan Muhammadiyah, bersama kelompok Islam lainnya, ini pada akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya rancangan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Peradilan Agama.

Namun hal yang sama tidak terjadi pada rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 28 ayat 2 yang tidak mulus untuk disahkan sebagaimana yang dikehendaki semula, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tahun 1989 ini. Tetapi, perjuangan Muhammadiyah dan kelompok Islam lainnya ini masih berlanjut hingga akhirnya semangat yang ada pada pasal 28 ayat 2 ini diakomodir dan disahkan dalam perubahan UU Sisdiknas pada 2003 lalu.

Demikianlah beberapa peristiwa yang menggambarkan mengapa dan bagaimana Muhammadiyah lebih dicitrakan oleh berbagai kalangan

sebagai gerakan yang anti misi Kristen dan mengakibatkan hubungan yang harmonis antara Muhammadiyah dan kalangan Islam lainnya dengan umat agama lain, khususnya kelompok Kristen, sejak masa kolonialisme Belanda hingga era Soekarno dan era Soeharto lalu. Perkembangan berikutnya dari sikap Muhammadiyah dalam merespon realitas pluralitas agama di Indonesia secara umum akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Penutup

Berdasarkan telaah di atas, bisa disimpulkan bahwa kehadiran misi Kristen ke Negeri ini, menjadi faktor pendorong utama yang memicu munculnya semangat keagamaan K.H. Ahmad Dahlan, yang pada gilirannya menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Kehadiran dan penetrasi Kristen terutama adalah hasil upaya kolonialisme Belanda dalam memupuk semangat misi Kristen. Dalam rangka menghadapi pengalaman menyakitkan berupa perlakuan tidak adil dan rasa takut akan kehilangan identitas keagamaan yang diakibatkan oleh kebijakan kolonial Belanda, serta diperkuat oleh kerja sama pihak kolonial dan misi Kristen. Kaum Muslim mulai menggalang upaya bersama menentang fenomena yang mengancam tersebut. Kelahiran Muhammadiyah adalah salah satu perwujudan jelas perlawanan terhadap kalaborasi penguasa kolonial dan misi Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suandi Hamid, M. Dasron Hamid , dan Syafri Sairin (penyunting.). 2000. *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*. Yogyakarta: UII Press. Harapan.
- Jainuri, Ahmad. 2002. *Ideologi Kaum Reformis*. Surabaya: LPAM.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1994. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- _____.1999. *Gerakan “Pemurnian Islam” Di Pedesaan (Kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1990. *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- PP Muhammadiyah. 2000. *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44*, Yogyakarta: PPM.
- _____. 2000. *Tafsir Tematik al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Sairin, Weinata. 1995. *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*. Bandung: Mizan.